

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) terletak di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan, Taman Nasional ini terletak antara 100°31'18"BT - 102°44'01"BT dan 1°07'13"LS - 1°26'14"LS (Buku Informasi TNKS, 2018). Dengan luas 1.389.509.867 hektar, dan potensi yang ada di dalam TNKS maka Balai Besar TNKS akan menghadapi banyak masalah salah satunya adalah perladangan. Kawasan TNKS yang sebagian besar berupa dataran tinggi bertanah subur yang sangat cocok untuk ditanami kopi serta tanaman hortikultura seperti kentang, kol dan cabai menjadi daya tarik utama yang membuat para warga terus melakukan perladangan.

Menjaga dan berpatroli di kawasan TNKS merupakan tugas berat bagi pengelola Taman Nasional. Meskipun terdapat sejarah panjang dalam pendirian Taman Nasional, dibanyak tempat masyarakat masih tidak menghormati batas-batas Taman Nasional. Dalam kasus lain, masyarakat yang tidak mengetahui batas Taman Nasional banyak yang bercocok tanam dan membangun rumah di lahan di dalam Taman Nasional, disepanjang perbatasan dan kadang-kadang bahkan jauh di dalam taman nasional (Purwanto, 2016).

Masyarakat yang tinggal di pinggir hutan sehari-harinya beraktivitas tidak jauh dari hutan. Aktivitas masyarakat di hutan telah berlangsung sejak lama, dimulai dari pemanfaatan sederhana beberapa pohon untuk dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat tidak hanya mengambil sebagian pohon saja, namun juga melakukan kegiatan pembukaan lahan yang biasa disebut dengan perladangan (Alfany *et al.*, 2015).

Peladang dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan aktivitas di dalam hutan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan, aktifitas peladang tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan dengan membakar kayu-kayu yang sudah di tebang dan ada juga yang mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara illegal (Totok, 2011).

Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar hutan akan berakibat pada kondisi hutan di sekelilingnya. Mereka akan menggantungkan

hidupnya pada hutan yang ada di sekitarnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Tanpa adanya pengelolaan yang baik dan tepat, hal seperti ini menjadi ancaman bagi keberadaan dan kelestarian hutan, serta dapat menurunkan fungsi dari permukaan hutan tersebut.

Aktivitas perladangan hutan di TNKS terjadi pada tahun 1992/1993 dengan ditanami dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti kulit manis dan kopi, kulit manis memiliki harga yang cenderung stabil dari tahun ke tahun dibandingkan komoditi lain, sehingga hal tersebut mendorong para peladang untuk memperluas lahan pertaniannya, para peladang menggunakan padang alang-alang, semak belukar, kebun tua, ataupun hutan untuk dijadikan lahan yang dibersihkan dengan cara ditebas bakar, adapun total luas hutan yang di rambah 38.961,55 ha, aktivitas perladangan di Kawasan TNKS terjadi di beberapa daerah seperti Kecamatan Gunung Kerinci (21.843,80 ha), Kecamatan Gunung Raya (10,636,45 ha), Kecamatan Air Hangat (1.304,15 ha), Kecamatan Sungai Penuh (2.256,25 ha) dan Kecamatan Setinjau Laut (679,15 ha) serta Kecamatan Danau Kerinci (2.241,65 ha) (Fazriyas, 1998). Perladangan kawasan TNKS untuk kegiatan pertanian disebabkan adanya kebutuhan lahan pertanian karena hanya sedikit masyarakat yang memiliki lahan pertanian. Jika batas kawasan TNKS tidak jelas atau masyarakat setempat tidak mengetahuinya, maka risiko perladangan akan semakin besar (Teguh *et al.*, 2009).

Apabila perladangan yang terjadi di TNKS dibiarkan terus berlanjut, maka akan menyebabkan kerusakan hutan dan berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan (Izzudin,2012). Dalam hal ini maka perlu adanya usaha atau upaya untuk mengurangi tingkat perladangan yang terjadi di TNKS.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi perladangan di dalam TNKS adalah relokasi atau perpindahan penduduk dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan tujuan tertentu, upaya pemerintah dalam relokasi eks peladang adalah dengan membuat program transmigrasi yang dilakukan pada tahun 1995 dan 1996. Program transmigrasi yang dilakukan tersebut termasuk dalam jenis transmigrasi alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) atau transmigrasi umum yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Jambi, program transmigrasi para peladang hutan di dalam Kawasan

Taman Nasional Kerinci Seblat dilakukan dengan cara transmigrasi sisipan dari transmigrasi umum tersebut yang dilakukan dengan pola PIR-TRANS (Fazriyas, 1998).

PIR-TRANS atau perkebunan inti rakyat adalah pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan swasta dimana pemerintah melakukan kerjasama dengan PTPN VI yang merupakan perusahaan pengolah sawit dan pemerintah memberikan jatah lahan seluas 2 hektar yang sudah ditanami sawit dan perkarangan seluas 0.5 hektar yang diberikan untuk menanam kebutuhan sayur dan palawija sebelum sawit tersebut menghasilkan, selain itu pemerintah juga memberikan kebutuhan pokok yang diberikan sebulan satu kali selama satu tahun berupa beras, gula, garam, minyak goreng, sabun dan lain sebagainya (Yulmardi, 2019). Dengan kata lain program transmigrasi sisipan dengan pola PIR-TRANS memiliki tujuan untuk mengurangi kerusakan kelestarian hutan yang terjadi di TNKS dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks peladang hutan dengan mata pencaharian yang baru tanpa merusak hutan TNKS.

Salah satu wilayah yang menjadi tempat tujuan transmigrasi tersebut adalah Kecamatan Mestong, Kecamatan Mestong merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Batang Hari dan terdapat beberapa Unit Pemukiman Transmigrasi yang dikepalai oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang berasal dari Kantor Transmigrasi, hal tersebut dikarenakan masyarakat yang baru berpindah melalui program transmigrasi tersebut dianggap belum mampu mensejahterakan wilayah transmigrasi tersebut, oleh karena itu wilayah tersebut masih di bawah naungan pemerintah. Lalu pada tahun 2001 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor. 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Bahar pada peraturan tersebut dilakukan pemekaran wilayah dimana Kecamatan Mestong menjadi Kecamatan Sungai Bahar dan berada pada Kabupaten Muaro Jambi seiring dengan pemekaran tersebut wilayah transmigrasi yang di kepalai oleh Kepala UPT yang berasal dari kantor transmigrasi berubah menjadi kepala desa dimana kepala desa yang mencalonkan diri berasal dari desa tersebut dan pemilihannya dilakukan langsung oleh penduduk desa tersebut. Demikian hal nya masyarakat tersebut sudah dianggap mampu untuk mensejahterakan wilayahnya sendiri tanpa dibantu oleh Kepala UPT. Selanjutnya pada Peraturan daerah

Kabupaten Muaro Jambi Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Utara, dan Bahar Selatan menjelaskan bahwa Kecamatan Sungai Bahar dilakukan pemekaran wilayah menjadi 3 Kecamatan yaitu Bahar Utara, Bahar Selatan, dan Sungai Bahar. (Sari *et al.*, 2015). Pemekaran wilayah yang ada di Kecamatan Sungai Bahar pada tahun 2009 sesuai Perda No. 28 Tahun 2009 tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan secara merata kepada masyarakat yang diharapkan mampu memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Desa Adipura Kencana, Desa Bukit Jaya, dan Desa Tanjung Sari merupakan 3 desa dari 10 desa yang berada di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat eks peladang dan mempunyai potensi utama pada sektor perkebunan terutama kelapa sawit. Dengan adanya mata pencaharian tersebut masyarakat eks peladang tidak lagi melakukan perladangan TNKS dan masyarakat eks peladang dapat meningkatkan keadaan sosial ekonominya karena secara ekonomi sektor perkebunan mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat setempat, masyarakat dikatakan sejahtera apabila semua kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan baik. kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk mengukur suatu tingkat kesejahteraan masyarakat eks peladang yang ada di Kecamatan Bahar Selatan, diperlukan indikator yang dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat. Keadaan sosial ekonomi dapat dilihat dari indikator BKKBN serta tingkat kesejahteraan masyarakat eks peladang dapat diukur dan diklasifikasikan menggunakan indikator-indikator yang mengarah kepada BKKBN. Indikator BKKBN tidak memberikan ukuran yang lebih langsung tentang keluarga miskin pada tingkat nasional dan tingkat administratif yang lebih rendah (desa) dan pada tingkat keluarga melainkan memberikan ukuran tentang seberapa sejahtera keluarga tersebut (Rambe, A., *et al.*, 2008).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan masyarakat eks peladang

Kawasan TNKS yang berada pada Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, sehingga penulis akan melakukan Penelitian yang berjudul “**Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Eks Peladang Kawasan TNKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis dapat membuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Gambaran Umum Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Eks Peladang Kawasan TNKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Eks Peladang Kawasan TNKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Gambaran Umum Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Eks Peladang Kawasan TNKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Menganalisis Tingkat Kesejahteraan Eks Peladang Kawasan TNKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi mengenai gambaran umum kondisi sosial ekonomi masyarakat eks peladang Kawasan TNKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Memberikan informasi tentang tingkat kesejahteraan masyarakat eks peladang Kawasan TNKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.
3. Bagi para peneliti lain dan pihak yang membutuhkan dapat digunakan sebagai pembandingan, bahan informasi, dan referensi.